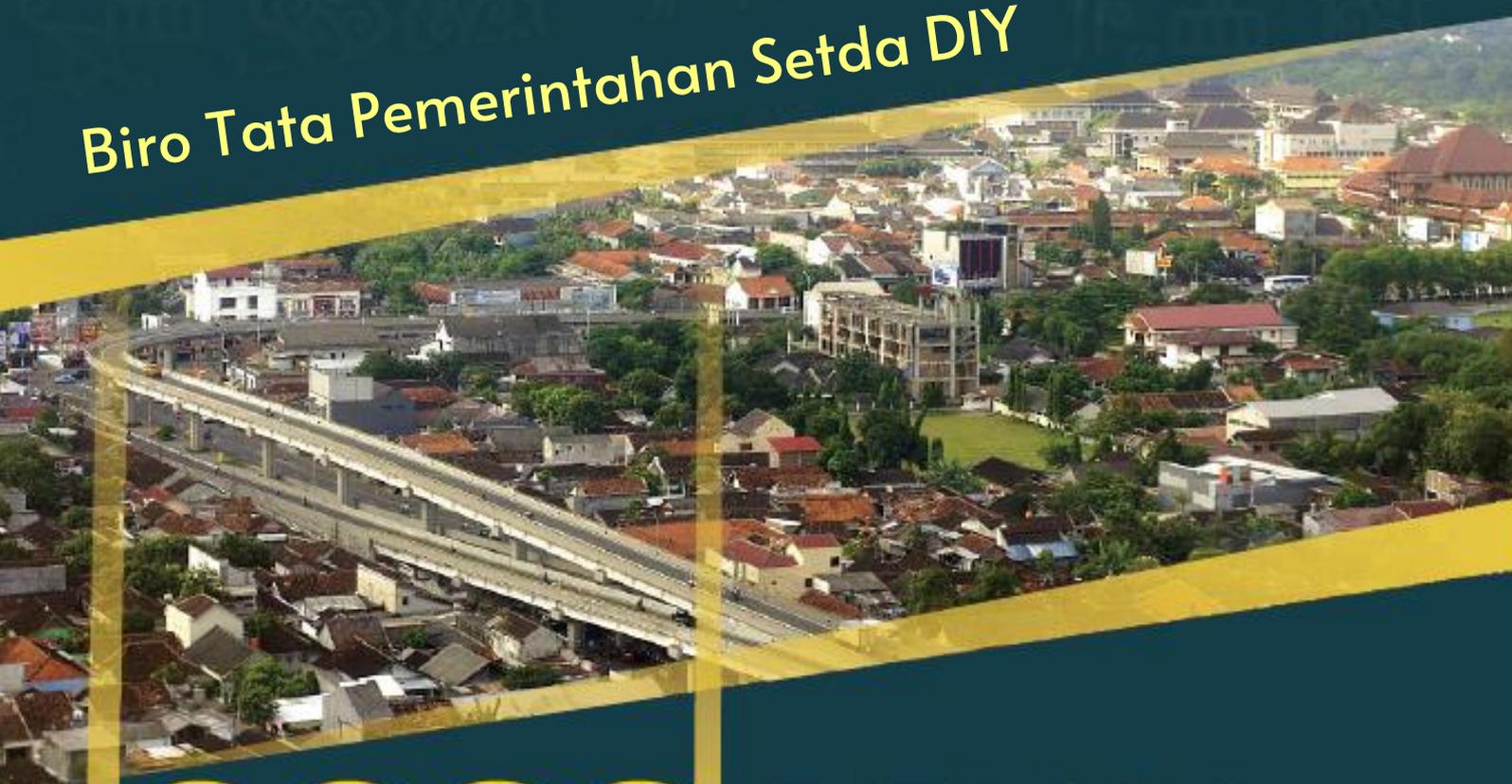


Biro Tata Pemerintahan Setda DIY



2022

RENJA

Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan tahun terakhir periode Renstra Tahun 2017-2022 yang bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja Tahun 2022 terdiri atas pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, program/kegiatan, dana indikatif beserta sumbernya di 2022 dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif di tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2022.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2022 terkait dengan substansi perubahan di bidang tata kelola pemerintahan yang meliputi bidang kelembagaan, analisa jabatan dan ketatalaksanaan serta sejalan dengan tema pembangunan DIY Tahun 2022. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mendukung tercapainya misi kedua dari RPJMD DIY 2017 -2022 yaitu; **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis**; dimana rumusan misi ini meringkas Panca Mulia 4, dan 5. Dari Misi tersebut, ditetapkanlah tujuan Biro Tata Pemerintahan, yang diharapkan akan tercapai di akhir periode Renstra yaitu; Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022 kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk pelaksanaan program kegiatan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 nanti. Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerjasama sinergis dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY

Yogyakarta, 21 Februari 2022

Ketua Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah DIY,



Hari Edy Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si.
NIP.197410171999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum.....	3
Maksud dan Tujuan.....	5
Sistematika Penulisan	5
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2020 (n-2)	6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2020	6
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36
Urusan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum	40
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
Review terhadap Rancangan Awal RKPD	46
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	67
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	67
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	69
Program dan Kegiatan.....	71
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	87
PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	7
Tabel 2. 2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran	28
Tabel 2. 3 Capaian Target Kinerja Renstra Biro Tata Pemerintahan	29
Tabel 2. 4 Dinamika Perencanaan pada Indikator Kinerja.....	33
Tabel 2. 5 Dinamika Perencanaan Program/Kegiatan Pada Indikator Kinerja	34
Tabel 2. 6 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020	39
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	39
Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah Tahun 2020.....	40
Tabel 2. 9 Rencana Kinerja Tahun 2022	46
Tabel 2. 10 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	47
Tabel 2. 11 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	66
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	70
Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	71
Tabel 4. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah	44

Rancangan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Penyusunan RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD DIY 2017 - 2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2022 memiliki keterkaitan langsung dengan Rancangan RKPD DIY Tahun 2022. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2022, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY Tahun 2022. Selanjutnya Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD DIY Tahun 2022 yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Terdapat lima regulasi pada level undang-undang yang mempengaruhi dan membawa konsekuensi untuk implementasi perencanaan dan penganggaran tahun 2022 pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2022 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-370 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Setra Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Maksud dan Tujuan

Maksud :

- a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan;
- b. Mengefektifkan dan mengarahkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan :

Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparan, akuntabel, partisipatif serta selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah DIY.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum serta sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2022.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2020/n-2)

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKP, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan Renja, sasaran Renja dan uraian Program dan Kegiatan Renja.

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

Bab ini berisi penutup dari uraian Bab-Bab sebelumnya.

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2020 (n-2)

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target program-kegiatan pada Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan realisasi pelaksanaan program-kegiatan pada tahun 2020, kemudian memperkirakan realisasi capaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) pada tahun berjalan. Dengan demikian diperoleh informasi mengenai realisasi program kegiatan yang tidak mencapai target, kemudian program kegiatan yang mencapai target, serta program kegiatan yang melampaui target pada tahun 2020. Disamping itu, evaluasi juga dilakukan terhadap keadaan pegawai pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY beserta dengan analisis kebutuhan pegawai (data per tanggal 31 Desember tahun 2020), serta keadaan sarana dan prasarana pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun anggaran (TA) 2020.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2020

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY selanjutnya dipergunakan untuk menentukan program kegiatan yang tidak mencapai target, kemudian program kegiatan yang mencapai target, serta program kegiatan yang melampaui target pada tahun 2020, khususnya program/kegiatan hasil redesain SKPD tahun 2020. Penentuan didasarkan pada kolom 8 atau kolom prosentase Tingkat Realisasi (Realisasi Renja SKPD tahun 2020 dibagi dengan Target Renja SKPD tahun 2020). Berikut disampaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sampai dengan tahun 2020

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (n-2) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Lembar : 1

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
		PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.97%	93.23 %	86.10%	99.42%	115%	87.17%	99%	113.57%
		Semula Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	01. Blanko KIA	1.000 keping	n/a	20000	20000	100	1000	1000	100
			02. Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan(Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar)	50 dokumen	80	80	80	100	80	80	100
			03. Masyarakat yang sadar adminduk	800 orang	n/a	600	600	100	1000	1000	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
			04. KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	2.000 keping blangko KTP-el dan 750 keping KIA	n/a	200	200	100	200	200	100
			05. Lembaga yang Dikoordinasi dan Bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	5 lembaga	3	7	7	100	5	5	100
			6. Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lintas Kab/ Kota se-DIY	2	3	2	2	100	2	2	100
			7. Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	2	3	7	7	100	3	3	100
			8. Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan	2	3	0	0	0	2	2	100
			9. Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/kota	1	1	1	1	100%	1	1	100%
			10. Profil perkembangan kependudukan	1	1	1	1	100	1	1	100
	Menjadi	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.97%		86.10%	99.42%	115%	87.17%	99%	113.57%

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota								
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Blanko KIA	1.000 keping	0 keping	20000	20000	100	1000	1000	100
			KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	2.000 keping blanko KTP-el dan 750 keping KIA	n/a	200	200	100	200	200	100
			Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lintas Kab/ Kota se-DIY	2 kali	3	2	2	100	2	2	100
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.97%		86.10%	99.42%	115%	87.17%	99%	113.57%
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi dan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan								

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		1. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan(Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar)	50 dokumen	80	80	80	100	80	80	100
		2. Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Instansi yang memanfaatkan data kependudukan		3	7	7	100	3	3	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.97%		86.10%	99.42%	115%	87.17%	99%	113.57%
		Kegiatan Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Subkegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Subkegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan								
		1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Masyarakat yang memahami Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	200 orang	480	600	600	100%	1000	1000	100%

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		2. Sub Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Masyarakat yang sadar adminduk	600 orang	n/a	n/a	n/a	0%	600	600	100%
		3. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga yang Dikoordinasi dan Bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	5 lembaga	3	7	7	100%	3	3	100%
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendencygunaan Data Kependudukan								
		1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pelayanan Adminduk di kabupaten/kota	1	1	1	1	100%	1	1	100%
		2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendencygunaan Data Kependudukan	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Adminduk di Kab/kota	n/a	n/a	n/a	n/a		130 orang	130 orang	100%
			2. Peningkatan pemahaman kebijakan aminduk bagi masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a		90 orang	90 orang	100%

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
			3. Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan publik	n/a	n/a	n/a	n/a		20 lembaga	20 lembaga	100%
			4. Penyediaan blangko KTP-el bagi pelayanan di kab/kota	n/a	n/a	n/a	n/a		150000	150000	100%
			5. Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	n/a	n/a	n/a	n/a		3 jenis	3 jenis	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.97%		86.10%	99.42%	115%	87.17%	99%	113.57%
		Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi dan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain								
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan	2	3	0	0	0	2	2	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		2. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Profil perkembangan kependudukan	1	1	1	1	100	1	1	100
		PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%		100%	107.69	107.69	100%	100%	100%
		Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 Laporan Standar Pelayanan Minimal	1	1	1	100	1	1	100
			Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen	1	1	1	100	1	1	100
			Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi	1	1	1	100	1	1	100
		Kegiatan Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	Laporan Penyelenggaraan Forum Mitra Praja Utama di DIY	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100
			Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	5 naskah kerjasama	100	5	5	100	5	5	100
			Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	5 rekomendasi	100	0	0	100	2	2	100
			Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB	100	0	0	100	2	2	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%		100%	107.69	107.69	100%	100%	100%
		Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan								
		Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100
	Menjadi		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100
			Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi	1	1	1	100	1	1	100
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah								
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Laporan Penyelenggaraan Forum Mitra Praja Utamadi DIY	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100
			Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	5 Naskah Perjanjian	100	5	5	100	5	5	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB	100	0	0	100	2	2	100
		Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	5 Rekomendasi	100	0	0	100	2	2	100
		PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	100.00%		56.25%	100.00%	178%	79.17%	100%	100.00%
		Kegiatan Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100
			Laporan Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD)	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100
		Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di DIY	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Desa Tertinggal yang memiliki Pengelolaan Keuangan yang Baik	100.00%		56.25%	100.00%	178%	79.17%	100%	100.00%
		Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan								
	Menjadi	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100
			Laporan Kecamatan dengan aparaturnya yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD)	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100
		PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100		100	130	130	100	100	100
	Semula	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	3 usulan/draf SK	3	2	6	300	3	3	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Laporan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100
		Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	1 dokumen	1	0	0	100	1	1	100
			Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kab/kota	1 dokumen	1	-	-	-	1	1	100
			Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY	1 dokumen	1	1	1	100	1	1	100
			Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan	1 laporan	n/a	1	1	100	1	1	100
			Toponimi unsur warisan budaya	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100
			Koordinat pilar batas secara geodetik	30 titik	30	30	30	100	30	30	100
	Menjadi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100		100	130	130	100	100	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan								
		Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	3 usulan SK	3	2	6	300	3	3	100
			Laporan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100
		Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah								
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Database pilar batas untuk pengelolaan tandabatas wilayah	1 Dokumen	1	0	0	100	1	1	100
			Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kabupaten/kota	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
			Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
			Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan	1 Laporan	1	1	1	100	1	1	100
			Toponimi unsur warisan budaya	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Barang Cetak	16 jenis	13	16	16	100	13	13	100
			Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua	7 unit	7	7	7	100	7	7	100
			Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat	5 unit	5	5	4	80	5	5	100
			Jasa Surat-menyurat	3 jenis	3	3	3	100	3	3	100
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 jenis	14	16	16	100	15	15	100
			Alat Tulis Kantor	37 jenis	36	37	37	100	34	34	100
			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	11	11	11	100	8	8	100
			Dokumen hasil penggandaan	80000 lembar	69894	55000	55850	101.545455	50000	50000	100
			Tabung pemadam kebakaran yang terisi	11 tabung	11	11	11	100	11	11	100
			Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	12 bulan	12	12	12	100	12	12	100
			Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi	12 bulan	12	12	12	100	12	12	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
	Menjadi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 jenis	11	11	11	100	8	8	100
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	37 jenis	36	37	37	100	34	34	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Tabung pemadam kebakaran yang terisi	11 tabung	11	11	11	100	11	11	100
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan RumahTangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 jenis	14	16	16	100	15	15	100
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	Barang Cetak	16 jenis	13	16	16	100	13	13	100
			Dokumen hasil penggandaan	80000 lembar	69894	55000	55850	101.545455	50000	50000	100
		5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	12 bulan	12	12	12	100	12	12	100
			Laporan tindak lanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat-menyurat	3 Jenis	3	3	3	100	3	3	100
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100
	Semula	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan kantor sesuai RKBMD	4 jenis	4	2	2	100	4	4	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	4 jenis	4	6	6	100	1	1	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBM	12 bulan	7 unit	7 unit	7 unit	100	12 bulan	12 bulan	100
			Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBM	12 bulan	5 unit	5 unit	5 unit	100	12 bulan	12 bulan	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBM	12 bulan	14 jenis	15 jenis	15 jenis	100	12 bulan	12 bulan	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100
	Menjadi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Kantor sesuai RKBMD	4 jenis	4	2	2	100	3	3	100
			Perlengkapan Kantor sesuai RKBMD	4 jenis	4	6	6	100	1	1	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKBMD	12 bulan	7 unit	7 unit	7 unit	100	12 bulan	12 bulan	100
			Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKBMD	12 bulan	5 unit	5 unit	5 unit	100	12 bulan	12 bulan	100
		2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKBMD	12 bulan	14 jenis	15 jenis	15 jenis	100	12 bulan	12 bulan	100
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100
	Semula	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	86 Poin	86	70	83.54	119.342857	86	86	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	14 laporan	14 laporan	100
		Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen perencanaan OPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	10 dokumen	10	10	10	100	10	10	100
			Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD	1 berita acara	1	1	1	100	1	1	100
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan sesuai Tahapan ROPK	100%	95%	95%	95%	100	100%	100%	100
	Menjadi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	10	10	10	100	10	10	100
			Kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1	1	1	100	1	1	100
		2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	86 poin	86	70	83.54	119.34	86	86	100
			Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	100%	95%	95%	95%	100	100%	100%	100

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dan Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji ASN Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 Tahun							
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pekantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 Bulan							
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan							

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Keterangan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Bulanan dan Dokumen Laporan Semesteran	14 Laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	14 laporan	14 laporan	100
		5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari target yang telah disusun seluruhnya memenuhi target dari yang telah ditetapkan. Dari sisi indikator output (keluaran) seluruhnya memenuhi target. Tetapi apabila di lihat dari indikator inputnya dari sisi realisasi anggarannya terdapat beberapa serapan yang tidak optimal yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang tidak mempengaruhi kualitas pencapaian target. Dari target anggaran sebesar Rp. 3.245.418.000 (100%), diperoleh angka realisasi sebesar Rp. 2.773.070.279 (85.45 %). Berikut disampaikan efisiensi anggaran per sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2020:

Tabel 2. 2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	113.85	81,99	18.01
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	100	86.42	13.58

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2020

Berdasarkan tabel analisis efisiensi di atas dapat diketahui bahwa sasaran pertama dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan memiliki nilai efisiensi 18,01%. Efisiensi anggaran terjadi karena faktor eksternal di antaranya adalah kebijakan APBD untuk tidak membelanjakan rekening tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, efisiensi perjalanan dinas, dan sisa pengadaan barang dan jasa

Sedangkan indikator dari sasaran kedua dengan indikator Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK, memiliki nilai efisiensi 13.58%. Hal itu terjadi dikarenakan pada sasaran kedua juga mengalami efisiensi di beberapa rincian objek belanja. Beberapa efisiensi tersebut di atas, tidak mengganggu capaian indikator output kegiatan, sehingga capaian output tetap $\geq 100\%$ dari target yang ditentukan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur DIY dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2020 adalah : 1) Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan

kerja sama; dan 2) Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan; dengan target Renstra dan realisasi capaian Renstra tahun 2020 sebagai berikut.

**Tabel 2. 3 Capaian Target Kinerja Renstra Biro Tata Pemerintahan
Setda DIY Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2020		Realisasi Capaian Renstra Tahun 2020		% Rasio Capaian Renstra Tahun 2020	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100	Rp. 1.924.994.500	113.85	Rp. 2.280.437.000	113.85	144.05
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	10	Rp. 1.052.761.000	100	Rp. 802.421.358	100	76.22
Rata-rata Capaian							106.93	110.36

Berdasarkan capaian target kinerja di atas, selanjutnya dilakukan analisis per sasaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada Renstra Tahun 2020. Secara umum capaian renstra tahun 2020 telah memenuhi target, bahkan pada indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan melebihi target yaitu sebesar 113.85% dari target 100%. Berikut disampaikan evaluasi dan analisis Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2020 berdasarkan tabel di atas.

Pada sasaran kedua (Meningkatnya tertib administrasi kependudukan) mendapatkan dukungan tambahan dari Dana Alokasi Khusus sebesar anggaran Rp 232.036.000,00 untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sehingga total anggaran tahun 2020 (APBD+DAK) sejumlah Rp 964.981.000,00.

A. Sasaran Pertama : Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama

Sasaran pertama dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2020 adalah Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama. Sasaran

ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan.

A.1. Indikator Kinerja : Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan

Indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan memiliki target kinerja dan anggaran pada Renstra tahun 2020 masing-masing sebesar 100% dan Rp1.924.994.500,00. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2020 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 113.85% dan Rp. 2.280.437.000,00. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2020 terhadap target dan realisasi sebesar 113.85% kinerja dan 144.05% anggaran (Tabel 2.1).

Secara makro, performa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk mencapai indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan (dengan target 100%) berjalan optimal. Sampai dengan akhir triwulan IV TA 2020, telah dihasilkan 26 dari target 23 rumusan bahan kebijakan dalam merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, sehingga diperoleh capaian realisasi indikator sebesar 113.85%. Adapun rincian dari 26 rumusan bahan kebijakan tersebut di antaranya ialah :

- 1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus untuk Pemilukada 2020
- 3) Kode dan Data Administrasi Pemerintahan
- 4) Keputusan Gubernur Nomor 120/KEP/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul a.n. Sumaryanto dan Lagiyo
- 5) Keputusan Gubernur Nomor 231/KEP/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul a.n. Anton Supriadi dan Umiyati
- 6) Surat Edaran Gubernur Nomor 270/11545 tentang Netralitas ASN, Pegawai BUMN/ BUMD, Kepala Desa/ Lurah, dan Perangkat Desa/ Pamong Kalurahan, 1 Surat Gubernur hal Usulan Penunjukan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul, Surat Gubernur hal cuti di Luar Tanggungan Negara (4 surat untuk Bupati Bantul, Wakil Bupati Bantul, Wakil Bupati Gunungkidul, Wakil Bupati Sleman)

- 7) Keputusan Gubernur Nomor 278/KEP/2020 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Bantul
- 8) Keputusan Gubernur Nomor 324/KEP/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sleman atas nama Danang Maharsa
- 9) Keputusan Gubernur Nomor 343/KEP/2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sleman atas nama Sri Haryani
- 10) Keputusan Gubernur Nomor 381/KEP/2020 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta atas nama Syamsul Hadi dan digantikan oleh Dra. Rini Hapsari
- 11) Nota Kesepakatan Nomor No. 2 tahun 2020 No. 119/00895/2020 dan No. 13.1/NKB.YK/III/2020 tanggal 14-03-2020 antara Kementerian Perindustrian dgn. Pemda DIY dengan Pemkot Jogja tentang Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
- 12) Perjanjian Kerjasama Nomor 119/3619/2020 dan No. B/PKS/5/II/2020/Ditpamovit tanggal 26-02-2020 antara Pol PP DIY dengan Dir.Obyek Vital Polda DIY tentang Pengamanan Obyek vital dan obyek tertentu
- 13) Kesepakatan Bersama Nomor 11/MOU.UAD/IV/2020 dan No. 119/5856/2020 tanggal 03-04-2020 antara UAD Yogyakarta dgn. Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah
- 14) Perjanjian Kerjasama Nomor 099/Kep/Set/III/2020 dan No. 9297/OM 0004 tanggal 26-03-2020 antara Diskop dan UKM DIY dengan PT, BPD DIY tentang Pemanfaatan Jasa dan Produk Perbankan dan Kartu Mitra Usaha Kecil
- 15) Perjanjian Kerjasama No. 119/8154/2020, No. 1938/UN1/DUI/DIT-PUI/HK/2020 No. 314/KS/KADINDIY/2020 tanggal 28-05-2020 antara Disperindag DIY dengan UGM dan Kadin DIY tentang Pengembangan SDM, Teknologi dan Pemasaran Produk UKM siap ekspor
- 16) Rencana Kerja No. 119/ 12338/2020, No. B/MOU-16/IX/2020 tanggal 10-09-2020 antara POLDA DIY dengan Pemda DIY tentang Pemanfaatan Informasi dan Komunikasi dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat di wilayah DIY
- 17) Nota Kesepakatan No. 119/ 02229/2020 dan No. 119/015-KS/B.1/IX/2020 tanggal 10 -09-2020 antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan Pemda DIY tentang Kerjasama Pembangunan Daerah.
- 18) Perjanjian Kerja Sama No. 119/28294/2020 No.30/PRJ.KP/HKM/2020 tanggal 19-08-2020 antara Pemda DIY dengan Pemkab

Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kamijoro

- 19) Nota Kesepakatan No. 119/ 02228 No. 2028/SKB-34.NP.02/IX/2020 tanggal 10-09-2020 antara Pemda DIY dengan Kanwil BPN tentang Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria
- 20) Nota Kesepakatan No. 119/ 14053/2020 No. 22/1/Yk/NK/2020/B tanggal 14-09-2020 dengan Kanwil BI DIY tentang Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing
- 21) Kesepakatan Bersama No. 119/ 14056/202 dan No. WYK/I/0021/R, tanggal 14-09-2020 antara Pemda DIY dengan PT BNI Kanwil Yogyakarta tentang Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi
- 22) Kesepakatan Bersama No. 119/14055/2020 dan No. 22/Kw-VII/KKI/09/2020, tanggal 14-09-2020 antara Pemda DIY dengan PT BRI Kanwil Yogyakarta tentang Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi
- 23) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 24) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 25) Kesepakatan Bersama 'No. 119/ 15294/2020 dan No. 055/AKAB/MOU/DIY/VIII/2020 tanggal 02-10-2020 Pemda DIY dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tentang Kerjasama Peningkatan Prekonomian di DIY (GOJEK)
- 26) Perjanjian Kerja Sama No. 119/19094/2020 dan No. 091/CT30400/2020-SO tanggal 01-12-2020 antara Pemda DIY dan PT. Pertamina tentang Rekonsiliasi Data Pajak BBMKB di DIY

**Tabel 2. 4 Dinamika Perencanaan pada Indikator Kinerja
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
yang direspon dengan kebijakan**

No.	Renstra Tahun 2020			RKA-P SKPD Tahun 2020		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran
1.	Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	100%	523.338.500	Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	100%	963.798.000
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan		272.985.500	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan		480.468.000
	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri		250.353.000	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri		483.330.000
2.	Program Pembinaan Perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	56,25%	435.551.000	Program Pembinaan Perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	56,25%	436.656.000
	Pembinaan Aparatur Kecamatan, DIY Desa/Kelurahan		326.918.000	Pembinaan Aparatur Kecamatan, DIY Desa/Kelurahan		260.223.000
	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan		108.633.000	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan		176.433.000
3.	Program: Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	130.645.500	Program Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Wilayah	100%	10.370.543.000
	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi		39.898.000	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi		10.201.130.000
	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		90.747.500	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		169.413.000
JUMLAH			1.089.535.000	JUMLAH		11.770.997.000

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:
(dari faktor penghambat web money 2020)

- 1) Adanya pandemi covid-19 menyebabkan kelumpuhan di semua sektor.
- 2) Penerapan SPM juga terkendala pendataan, perencanaan, penganggaran dan pendanaan sehingga perlu sinergitas antara OPD Pengampu dengan TAPD dan pihak ketiga serta mencari sumber-sumber dana lain yang sah untuk pemenuhan SPM Urusan;
- 3) Masih banyak instansi yang belum menggunakan PP 28/2018 tentang Kerjasama Daerah sebagai dasar penyusunan naskah kerjasama. Konsep kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang disebut dengan nama sinergi perencanaan

pelaksanaan pembangunan, belum begitu diketahui oleh instansi-instansi yang selama ini mengajukan permohonan kerjasama ke Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Kemudian faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu koordinasi yang solid baik secara internal maupun eksternal. Koordinasi menggunakan teknologi informasi lebih dioptimalkan mengingat pandemi covid-19 tidak memungkinkan bertatap muka secara langsung.

B. Sasaran Kedua : Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan

Sasaran kedua dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2020 adalah Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan. Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK.

B.1. Indikator Kinerja : Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK

Indikator Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK memiliki target kinerja dan anggaran pada tahun 2020 masing-masing sebesar 100% dan Rp1.052.761.000,00. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2020 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 100% dan Rp802.421.358,00. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2020 terhadap target dan realisasi sebesar 100% kinerja dan 76.22% anggaran (Tabel 2.1).

Tabel 2. 5 Dinamika Perencanaan Program/Kegiatan Pada Indikator Kinerja Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK

No.	Renstra Tahun 2020			RKA-P SKPD Tahun 2020		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran
1.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86.10%	1.052.761.000	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82.67 %	1.105.229.000
	a. Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		550.200.000	a. Pengembangan Sistem Informasi DIY Kependudukan		755.359.000
	b. Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan		270.525.000	b. Dukungan Pelayanan Administrasi DIY Kependudukan		349.870.000

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No.	Renstra Tahun 2020			RKA-P SKPD Tahun 2020		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran
	Pemanfaatan Data			(DAK)		
	JUMLAH		1.052.761.000	JUMLAH		1.105.229.000

Indikator kinerja Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK mencapai angka 100%. Capaian jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK tidak terlepas dari terjalinnya kerjasama dengan baik antara Instansi terkait Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder. Angka capaian ini merupakan akumulasi dari jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK yaitu mencapai 100%. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 telah terjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan 10 (sepuluh) organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Dinas Kesehatan DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bantuan Jaminan kesehatan);
2. Dinas Sosial DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bansos), Biro Kesra (Biro Bina Mental Spiritual) DIY;
3. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY (digunakan untuk integrasi data pemohon);
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (terintegrasi dengan aplikasi perijinan HAKI online di dinas perindustrian DIY);
5. Rumah Sakit Panti Rapih (Terintegrasi dengan layanan pendaftaran & database pasien);
6. RSIA Sadewa (Terintegrasi dengan layanan pendaftaran & database pasien);
7. RS Bhayangkara (Terintegrasi dengan layanan pendaftaran & database pasien);
8. Dikpora DIY (digunakan dalam PPDB online dan pemetaan sistem zonasi)
9. Diskominfo DIY (terintegrasi dengan aplikasi jogjapass)
10. Diskop UMKM DIY (digunakan dalam sistem aplikasi sibakul.jogjaprovo.go.id)

Capaian pelaksanaan program/kegiatan pada indikator kinerja ini sangat dipengaruhi oleh dinamika penduduk (pindah datang) dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memiliki KTP-el (tertib administrasi kependudukan). Berikut faktor penghambat dan pendukung pencapaian indikator Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK).

Faktor Penghambat:

- Adanya pandemi covid-19 membuat pengurangan target kinerja, aktivitas, dan pendanaan .

Faktor Pendukung :

- Komitmen yang tinggi serta kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten se DIY.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Pergub No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kependudukan. Dengan demikian Biro Tata Pemerintahan mengampu 2 urusan yakni Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Urusan Pendukung Urusan pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 terbagi dalam tiga bagian penting.

- a) Penguatan fungsi pelayanan di instansi pelaksana Adminduk yang berdampak langsung terhadap kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan.

Strategi penguatan fungsi pelayanan dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas dan kecepatan pelayanan di instansi pelaksana Adminduk. Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memberikan pelayanan terbaik kepada warganya dengan secara aktif mendatangi warga untuk melakukan perekaman biometrik di tempat tinggalnya terutama bagi penduduk yang berada di pelosok, penduduk lanjut usia, penduduk yang sedang sakit, dan penduduk rentan lainnya. Selain memberikan pelayanan kepemilikan KTP-el, pemerintah juga memberikan fasilitasi kepemilikan dokumen penting kependudukan bagi penduduk miskin/marginal yaitu berupa akta kelahiran dan akta perkawinan.

Pada tahun 2020 Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan pelayanan terpadu dalam rangka percepatan kepemilikan KTP-el sebanyak dua kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Pandawa Balaikota Yogyakarta dan Pendopo Manggala Parasamsya Kabupaten Bantul. Pelayanan terpadu ini merupakan wujud dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (*#GISA*), yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran utama dari *#GISA* adalah kepemilikan KTP-el pertama kali dan pemegang Surat Keterangan (surat pengganti KTP sementara) dan kepemilikan kartu KIA bagi anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah DIY tetap mampu menjalankan fungsinya untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat serta menampung dan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat. Fungsi tersebut dikemas secara daring melalui program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) yang diselenggarakan atas kerjasama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

- b) Pendayagunaan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP-el untuk mendukung kebutuhan data bagi instansi lintas sektor.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY telah memberikan dukungan pemanfaatan data kependudukan kepada berbagai instansi yang ada di DIY. Berikut detail pemanfaatan tersebut.

No	Nama Instansi	Keterangan Pemanfaatan Data
1	Dinas Kesehatan DIY	Verifikasi dan validasi data dalam penanganan covid-19 (melalui Dinas Kominfo DIY)
2	Dinas Sosial DIY	membantu dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan
3	Biro Kesra (Biro Bina Mental dan Spiritual) DIY	Verifikasi dan validasi penerima bantuan terkait kegiatan sosial keagamaan.
4	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY,	Verifikasi dan validasi dalam pengurusan izin investasi oleh BPKM Yogyakarta

5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,	Verifikasi dan validasi dalam pengurusan izin Hak Kekayaan Intelektual secara online.
6	Rumah Sakit Panti Rapih,	digunakan dalam integrasi sistem pendaftaran pasien baru.
7	RSIA Sadewa	digunakan dalam integrasi sistem pendaftaran pasien baru.
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	digunakan dalam PPDB <i>on-line</i> dan pemetaan sistem zonasi
9	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	telah mengintegrasikan data kependudukan dalam pengembangan aplikasi JogjaPass, yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk <i>self screening</i> Covid-19 sekaligus identitas digital bagi masyarakat DIY.
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	digunakan dalam sistem aplikasi sibakul.jogjaprovo.go.id

Sumber : (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2020)

Capaian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah berhasil memenuhi target jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK sebanyak 100 persen.

- c) Pencapaian target daerah terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, dan akta kematian)

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY menargetkan 86,1% penduduk di DIY telah memiliki dokumen penting administrasi kependudukan. Dari target tersebut sampai dengan akhir Desember 2020 telah terealisasi kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan sebesar 99,42% (115,47% dari realisasi). Dengan kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan, maka masyarakat akan lebih mudah dan terjamin dalam mengakses fasilitas publik.

Tabel 2. 6 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	120.68	86.10	99.42	115.47	92	108.12
2	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	instansi	7	10	10	100	15	66,66

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2020; sungguh.jogjaprovo.go.id/e-sakip

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	n/a	n/a	97%	n/a	n/a	n/a	n/a	97,87 %	n/a	n/a	n/a	n/a	-
	Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	n/a		80%	82,67 %	86,10 %	87,17 %	87,97 %	93.23 %	97,87 %	99.42 %	97,00 %	99.10 %	-

2.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	109%	120,68 %	107.69 %	100%	102%	-
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	---

Urusan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi

Tugas

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Fungsi

Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
- f. fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD;

- g. fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah;
- h. perumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan;
- k. penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;
- l. fasilitasi dan pengoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah;
- m. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- n. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi Daerah;
- o. pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan;

Berikut adalah beberapa isu strategis yang dilakukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY:

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.
 - a. Harmonisasi hubungan antar pemerintah daerah sangat berkaitan erat dengan pengelolaan dan penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar pemerintah daerah. Disamping itu peningkatan kerjasama antar daerah juga dapat seiring sejalan dengan terselesaikannya permasalahan di wilayah perbatasan tersebut.
 - b. Upaya-upaya penegasan batas wilayah diantaranya melalui pemeliharaan pilar dan papan batas serta pemahaman/sosialisasi tentang Permendagri yang mengatur tentang batas wilayah sehingga aparat maupun masyarakat paham mengenai batas wilayah perbatasan secara administratif, bukan yang ditandai dengan kenampakan alam saja.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat maupun pemerintah-pemerintah kabupaten/kota.
 - a. Koordinasi, konsultasi mengenai ruang lingkup penyelenggaraan urusan (melalui NSPK) dengan pemerintah pusat untuk disosialisasikan ke pemerintah daerah agar adanya kejelasan mengenai batasan ruang lingkup rincian urusan pemerintahan. Namun untuk urusan sub bidang urusan yang belum ada NSPKnya, pelaksanaan menjadi urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.
 - b. Tidak diaturnya ketentuan yang mengatur anggota DPRD kab/kota maupun provinsi yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum maupun khusus dalam hal

- keuangan, dalam masa tenggang menunggu keluarnya keputusan pemberhentian sementara baik dari Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri. Sehingga perlu penyamaan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam pidana khusus dan yang mengundurkan diri termasuk hak keuangannya.
- c. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota belum dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Dalam kegiatan pengalihan P3D terutama bidang PU, kewenangan pengalihan aset bersumber dari APBN merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Pengembangan sistem informasi dan database pemerintahan berbasis IT. Tuntutan pembangunan database pemerintahan berbasis teknologi informasi menjadi hal yang harus segera kita jawab dalam era global ini. Dengan demikian maka adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus semakin ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan tepat.
- a. Peningkatan pelayanan bidang kependudukan
Kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin masih rendah. Berdasarkan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) masih terdapat instansi atau lembaga swasta layanan publik belum melaksanakan tertib administrasi kependudukan, misal: masih dapat berlakunya surat keterangan kelahiran atau kematian dari desa/ kelurahan padahal semestinya menggunakan akta kelahiran atau akta kematian. Sementara itu, masih terdapat pemberlakuan surat keterangan domisili padahal semestinya sudah menggunakan KTP.
 - b. Melakukan sosialisasi dengan berbagai macam media untuk meningkatkan jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el untuk melakukan perekaman.
 - e. Aksesibilitas masyarakat tentang data di bidang kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Masing-masing kabupaten/kota telah mengembangkan inovasi layanan kependudukan agar lebih mudah diakses masyarakat. Di kabupaten Bantul ada GO AKTA (akta on line untuk rumah sakit/puskesmas), Kabuapten Kulon Progo ada Kacar Kucur (perkawinan lancar dokumen meluncur), Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Sidukunsemedi (Sistem Integrasi Dokumen Kependudukan satu hari mesti jadi), kabupaten Sleman ada

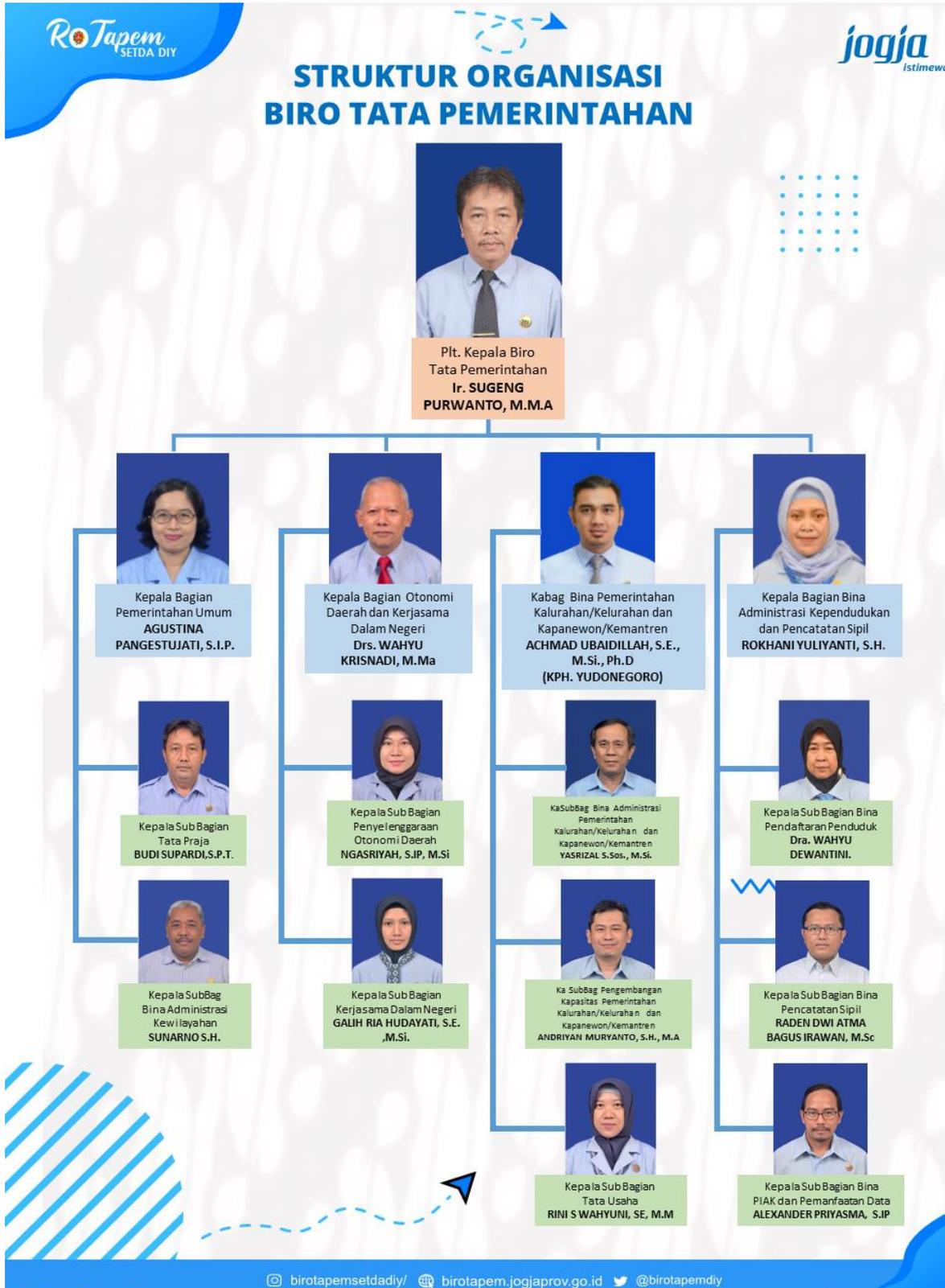
IDOLA (Integrasi Dokumen Layanan Kependudukan), dan Kota Yogyakarta memiliki Jogja Smart Service.

4. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
 - a. Berkaitan dengan pengalihan urusan kewenangan masih terdapat permasalahan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat terkait pengalihan aset Terminal A Kota Yogyakarta dan aset penyuluhan perikanan.
 - b. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan
 - c. keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang baru ditetapkan pada bulan April 2018 berdampak pada teknis kegiatan pendampingan APBDes Pro Poor, dari segi pedoman untuk melakukan entri pada program kegiatan berbasis pro kemiskinan (*pro poor*).
 - d. Terkait dengan segmen batas daerah antar kabupaten/kota lingkup DIY, untuk penggambaran peta batas daerah skala besar (1 : 5.000) saat ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena belum ada kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan di Provinsi Jawa Tengah (desa dan kabupaten). Dengan demikian peta database tersebut (tahun 2014-2018) belum dapat digunakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan KSP.
 - e. Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tentang Pergub Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pergantian Antar Waktu (PAW) Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD.
 - f. Antusiasme orang tua untuk menguruskan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak mereka menyebabkan lonjakan permohonan di Dinas Dukcapil kabupaten/kota, terutama di daerah yang padat penduduk seperti Sleman dan Kota Yogyakarta. Tingginya antusiasme tersebut diimbangi dengan kesiapan sarana prasarana seperti ketersediaan blangko dan ribbon film, alat cetak, serta personel.
 - g. Instansi penyelenggara bidang kependudukan di tingkat provinsi maupun instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota sering kali mendapatkan permohonan akses data penduduk dari instansi vertikal. Padahal dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, menyatakan bahwa instansi vertikal hanya dapat mengajukan permohonan akses data ke Ditjen Dukcapil

Kemendagri. Namun bila instansi di daerah tidak memberikan akses data akan menghambat pelayanan publik di daerah.

- h. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
- i. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Gambar 0.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Biro Tata Pemerintahan pada Ranwal RKPD 2021 merencanakan 3 program kesekretariatan; Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dan 4 program non kesekretariatan, di antaranya; Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah, Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama, Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan dan Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2. 9 Rencana Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	15 perangkat daerah

Untuk tahun 2022 Biro Tata Pemerintahan merancang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator rencana kinerja tahunan di atas. Berikut disampaikan secara singkat review program yang ada di dokumen Rancangan Awal RKPD 2022 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Tabel 2. 10 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Lembar : 1

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pendaftaran Penduduk (P90)*	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)		202.690.000	Program Pendaftaran Penduduk (P90)*	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)		18.752.000	
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan (K90)*					Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan (K90)*					
	1. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi (S90)*		Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan	80 dokumen	28.280.000	1. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi (S90)*		Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan	80 dokumen	11,668,000	
	2. Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan (S90)*		Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	3 instansi	174.410.000	2. Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan (S90)*		Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	3 instansi	7,084,00	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Program Pencatatan Sipil (P90)*	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)		212.011.000	Program Pencatatan Sipil (P90)*	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)		150,181,000	
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil (K90)*				212.011.000	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipi (K90)*				150,181,000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (S90)*		1. Blangko KIA 2. KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu 3. KTP-el yang terbit dalam pelayanan terpadu 4. Terselenggaranya pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lintas kabupaten/kota	1000 keping 750 KIA 2000 KTP 2 kali	212.011.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (S90)*		1. Blangko KIA 2. KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu 3. KTP-el yang terbit dalam pelayanan terpadu 4. Terselenggaranya pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lintas kabupaten/kota	1000 keping 750 KIA 2000 KTP 2 kali	150,181,000	
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (P90)*	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)	100%	114.759.000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (P90)*	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)	100%	62,331,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi (K90)*				12.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi (K90)*				8,794,000	
	1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (S90)*		Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di Kabupaten/Kota	1 dokumen	12.000.000			Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di Kabupaten/Kota	1 dokumen	8,794,000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (K90)*				102.759.000	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (K90)*				53,537,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (S90)*		Masyarakat yang memahami Peraturan Daerah No. 9 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	200 orang	31.400.000	1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (S90)*		Masyarakat yang memahami Peraturan Daerah No. 9 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	200 orang	22,556,000	
	2. Sub Kegiatan Penyelenggara Pemanfaatan Data Kependudukan (S90)*		Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam insentif Anak di DIY	5 lembaga	16.742.000	2. Sub Kegiatan Penyelenggara Pemanfaatan Data Kependudukan (S90)*		Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam insentif Anak di DIY	5 lembaga	10,167,000	
	3. Sub Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (S90)*		Masyarakat yang sadar adminduk	600 orang	54.617.000	3. Sub Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (S90)*		Masyarakat yang sadar adminduk	600 orang	20,814,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan (P90)*	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)		220.400.000	Program Pengelolaan Profil Kependudukan (P90)*	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)		206,948,00	
	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan (K90)*				220.400.000	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan (K90)*				206,948,00	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi (S90)*		Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan	2 konten	150.400.000	1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi (S90)*		Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan	2 konten (Aplikasi pemanfaat an data kependudu kan dan Aplikasi Laminduk desa/kelur ahan)	143,848,000	
	2. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (S90)*		Profil perkembangan kependudukan	1 dokumen	70.000.000	1. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (S90)*		Profil perkembangan kependudukan	1 dokumen	63,100,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (P90)*	DIY			8.545.000.000	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	DIY			7,608,214,041	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (K90)*				69.960.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (K90)*				37,229,000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (S90)*		1. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah	10 dokumen 1 BA	69.960.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (S90)*				18,054,000	
						Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6,761,000	
						Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12,414,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (K90)*				85.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (K90)*				338,372,000	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (S90)*		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	8.000.000	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (S90)*		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	7,996,000	
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (S90)*		1. Alat tulis kantor 2. Tabung pemadam kebakaran	13 jenis 11 tabung	40.000.000	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (S90)*		1. Alat tulis kantor 2. Tabung pemadam kebakaran	13 jenis 11 tabung	29,621,000	
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (S90)*		Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih	15 jenis	7.000.000	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (S90)*		Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih	15 jenis	7.000.000	
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan (S90)*		1. Barang cetakan 2. Dokumen hasil penggandaan	13 jenis 50000 lembar	30.000.000	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan (S90)*		1. Barang cetakan 2. Dokumen hasil penggandaan	13 jenis 50000 lembar	26,810,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (S90)* 5.		1. Laporan tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi 3. Laporan tindak lanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan 12 bulan	764.770.000	4. Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				248,145,000	
	6.		5.			6. Subkegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				18,800,000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*				21.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*				2,400,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (S90)*		Jasa surat menyurat	3 jenis	21.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (S90)*		Jasa surat menyurat	3 jenis	2,400,000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*				165.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*				160.732.000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (K90)*		1. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKBMD 2. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKMBD	5 unit 7 unit	165.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (K90)*				123,797,000	
			3.			Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36,935,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (K90)*				7.804.040.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (K90)*				7,052,513,041	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (S90)*		Pembayaran Gaji ASN Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 tahun	7.650.040.000	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (S90)*		Pembayaran Gaji ASN Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 tahun	7,011,298,041	
	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (S90)*		Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	1 tahun	150.000.000	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (S90)*		Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	1 tahun	31,560,000	
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (S90)*		Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	4.000.000	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (S90)*		Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	3,889,000	
	4.					2. Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				5,766,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (K90)*				400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (S90)*		Kendaraan dinas operasional roda empat sesuai RPJMD	1 unit	400.000.000						
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5,568,000	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (P90)*	DIY			914.770.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (P90)*	DIY			160,732,000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*				55.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan				123,797,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (S90)*		Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKBMD	12 bulan	55.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (S90)*		Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKBMD	12 bulan	36,935,000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (K90)*				13.500.000						
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (S90)*		1. Nilai LKJIP Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2. Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	86 poin 100%	13.500.000			1.			
	Kegiatan Administrasi Keuangan				6.500.000						

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perangkat Daerah (K90)*										
	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (S90)*		Dokumen Laporan Bulanan dan Dokumen Laporan Semesteran	14 laporan	4.000.000	1.					
	2. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (S90)*		Dokumen Laporan Prognosis	1 laporan	2.500.000	2.					
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (K90)*				75.000.000						
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (S90)*		1. Peralatan kantor sesuai RKBMD 2. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	3 jenis 1 jenis	75.000.000			1.			

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (P90)*	DIY			1.890.230.000	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (P90)*	DIY			881,680,000	
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah (K90)*				300.000.000	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah (K90)*				195,139,000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah (S90)*		1. Dokumen Pemetaan Kerjasama Daerah Semua Urusan 2. Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU 3. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	1 dokumen 2 SKB 5 naskah perjanjian	300.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah (S90)*		2. Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU 3. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	2 SKB 5 naskah perjanjian	195,139,000	
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah (K90)*				450.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah (K90)*				398,292,000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan (S90)*		1. Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	450.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan (S90)*		1. Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	203,482,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			4.			Subkegiatan : Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				194,810,000	
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (K90)*				510.230.000	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (K90)*				388.250.000	
	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (S90)*		1. Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu 2. Pengusulan dan Pelantikan Pejabat Kepala Daerah (Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta)	3 usulan SK 1 dokumen	135.230.000	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (S90)*		1. Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu 2. Pengusulan dan Pelantikan Pejabat Kepala Daerah (Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta)	3 usulan SK 1 dokumen	81,054,000	
	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah (S90)*		1. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah 2. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY 3. Laporan Penyelarasan Pembangunan di	1 dokumen 1 dokumen 1 laporan	375.000.000	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah (S90)*		1. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah 2. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY 3. Laporan Penyelarasan Pembangunan di	1 dokumen 1 dokumen 1 laporan	207,195,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			wilayah Perbatasan 4. Masyarakat yang memahami Pergub 39 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupa Bumi Buatan 5. Pilar perapatan batas daerah antara Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Purworejo yang terpasang 6. Toponimi unsur warisan budaya	100 orang 30 pilar 1 dokumen				wilayah Perbatasan 4. Masyarakat yang memahami Pergub 39 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupa Bumi Buatan 5. Pilar perapatan batas daerah antara Kabupaten Kulonprogo dengan Kabupaten Purworejo yang terpasang	60 orang 27pilar			
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah (K90)*				630.000.000							
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah (S90)*		1. Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsive 2. Laporan hasil koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi	1 laporan 1 laporan	630.000.000							

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di DIY 3. Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY 4. Laporan Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD)	1 laporan 1 laporan							
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				310,000,000	
						Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				310,000,000	
						Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				310,000,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				1,450,000,000	
						Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewan				1,450,000,000	
						Pelaksanaan Kelembagaan Asli				1,450,000,000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY				561,250,000	
						Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY				561,250,000	
						Koordinasi				561,250,000	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY					
	Jumlah				12.100.000.000					11.249.356.041	

Dari rancangan awal program Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang ada di Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2022 sebesar Rp12.100.000.000,00. Sedangkan setelah dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi (*existing*) saat ini, anggaran Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebesar 11.249.356.041,00. Hal tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika dalam pemerintahan dan kelembagaan yang harus segera disikapi dan direspon dalam proses perencanaan dan penganggaran demi penyelenggaraan tata pemerintahan yang optimal responsivitasnya.

**Tabel 2. 11 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					

Sedangkan mengenai usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2022 belum ada

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan peralihan antara periode RPJMD 2017 – 2022 dan RPJMD 2022-2027. Sebagai tahapan tahun kelima RPJMD 2017 – 2022, penyusunan RKPD tahun 2022 dilaksanakan dengan mengakomodir upaya penyelarasan materi awal IRPJMD 2017 – 2022 dengan menyesuaikan konten RKPD tahun 2022 dengan dokumen *background study* RPJMD terkait. Penyelarasan ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga keselarasan RKPD tahun 2022 dengan calon dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dijabarkan.

RPJMD DIY 2017-2022 berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dan beririsan dengan RPJMN 2020-2024 dimana penekanan pada RPJMD DIY 2017-2022 adalah pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas hidup dan kehidupan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta serta penguatan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis pada sumber daya lokal dan didukung oleh harmonisasi bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penekanan pada RPJMD DIY 2017-2022 ini telah selaras dengan visi RPJMN untuk memberdayakan sumberdaya manusia yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dalam hal menciptakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pemberdayaan sumber daya manusia ke arah Kesejahteraan Rakyat.

Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *money follows program*. Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilaksanakan dengan:

- 1) Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah
- 2) Penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- 3) Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

- 4) Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 5) Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah dan
- 6) Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah

Selain pada RPJMN 2015-2019, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 juga berpedoman pada RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025. RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta menjabarkan kehendak masyarakat DIY yang dijadikan pedoman dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selama 20 tahun. RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Visi RPJMD DIY pada periode 2017-2022 mengambil Tema:

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022. Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam **“Lima Kemuliaan”** atau **“Panca Mulia”** yakni:

- 1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
- 2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
- 3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
- 4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
- 5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan untuk Misi RPJMD DIY 2017-2022 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mendukung tercapainya misi kedua dari RPJMD DIY 2017-2022 yaitu; ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis***; dimana rumusan misi ini meringkas Panca Mulia (lima kemuliaan) 4, dan 5. Dari Misi tersebut, ditetapkanlah tujuan Biro Tata Pemerintahan, yang diharapkan akan tercapai di 2020 nanti yaitu; ***Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada visi dan misi DIY 2017-2022, maka selanjutnya Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Rumusan tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2017-2022 dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan DIY, yaitu optimalnya responsivitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Terdapat dua sasaran pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis tahun 2017-2022, yaitu:

1. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.
2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

Maka berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah DIY yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, berikut disajikan table tujuan dan sasaran pembangunan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2017-2022

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	4	7	10	13	15

Tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu *Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Sedangkan untuk sasaran strategisnya ada 2 (dua) diantaranya; 1). Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama, dengan indikator: Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan (target 100%), 2). Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, dengan indikator: Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK (target 15 instansi).

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Program dan Kegiatan

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN								
1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten								
1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah antara	Kota Yogyakarta	1 dokumen	Rp 310.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY			Rp 350.000.000,00

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo							
		Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri		1 dokumen					
		Pengembangan Sistem Informasi Database Administrasi Kewilayahan		1 dokumen					
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
2	Pelayanan pendaftaran kependudukan								
2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan	DIY	80 dokumen	Rp 11.668.000,00	APBD		80 dokumen	Rp 58.000.000,00
3	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	DIY	3 instansi	Rp 7.084.000,00	APBD		3 instansi	Rp 19.000.000,00
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
3	Pelayanan Pencatatan Sipil								
4	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Blangko KIA	DIY	10.000 kleping	Rp 150.181.000,00	APBD		10.000 kleping	Rp 200.000.000,00
		KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	DIY	750 KIA				750 KIA	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		KTP-el yang terbit dalam pelayanan terpadu	DIY	2.000 KTP				2.000 KTP	
		Terselenggaranya pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lintas kabupaten/koya	DIY	2 kali				2 kali	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
4	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi								
5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Masyarakat yang memahami Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	DIY	200 orang	Rp 22.556.000,00	APBD			Rp 50.000.000,00
6	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam	DIY	5 lembaga	Rp 10.167.000,00	APBD		5 lembaga	Rp 30.000.000,00

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Insentif Anak di DIY							
	7	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	DIY	600 orang	Rp 20.814.000,00	APBD			Rp 40.000.000,00
	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi							
	8	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DIY	1 dokumen	Rp 8,794,000,00	APBD		1 dokumen	Rp 12.000.000,00
5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							
	6	Penyediaan Profil Kependudukan							
	9	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	DIY	2 konten	Rp 143.848.000,00	APBD		2 konten	Rp 160.000.000,00
	10	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan	DIY	1 dokumen	Rp 63.100.000,00	APBD		1 dokumen	Rp 80.000.000,00

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	yang Lain								
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022-2027	Biro Tata Pemerintahan DIY	1 dokumen	Rp 18.054.000,00	APBD		1 dokumen	Rp 50.000.000,00
		Tersusunnya Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023		1 dokumen				1 dokumen	
		Tersusunnya Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022		1 dokumen				1 dokumen	
		Tersusunnya ROPK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022		1 dokumen				1 dokumen	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Tersusunnya PK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022		1 dokumen				1 dokumen	
12	Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen LKj IP	Biro Tata Pemerintahan DIY	80 poin	Rp 12.414.000,00	APBD		86 poin	Rp 16.000.000,00
		Konsep/Bahan LKPJ	Biro Tata Pemerintahan DIY	1 dokumen				100%	
		Konsep/Bahan LPPD	Biro Tata Pemerintahan DIY	1 dokumen					
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Biro Tata Pemerintahan DIY	8 jenis	Rp 7.996.000,00	APBD		8 jenis	Rp 9.000.000,00
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat	Biro Tata Pemerintahan DIY	3 jenis	Rp 2.400.000,00	APBD		3 jenis	Rp 24.000.000,00

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Biro Tata Pemerintahan DIY	1 tahun	Rp 7.011.298.041,00	APBD		1 tahun	Rp 8.000.000.000,00
16	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Biro Tata Pemerintahan DIY	1 tahun	Rp 31.560.000,00	APBD		12 bulan	Rp 40.000.000,00
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Biro Tata Pemerintahan DIY	1 dokumen	Rp 3.889.000,00	APBD		1 dokumen	Rp 4.400.000,00
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Bulanan Laporan	Biro Tata Pemerintahan DIY	12 laporan	Rp 5.766.000,00	APBD		12 laporan	Rp 7.100.000,00
		Laporan Keuangan Semester		2 laporan			2 laporan		
		Laporan Keuangan Triwulanan		4 laporan			4 laporan		
		Laporan Prognosis		1 laporan			1 laporan		

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Biro Tata Pemerintahan DIY	1 tahun	Rp. 11.400.000,00	APBD			Rp. 14.000.000,00
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Biro Tata Pemerintahan DIY	13 jenis	Rp 29.621.000,00	APBD		13 jenis	Rp 44.000.000,00
		Tabung pemadang kebakaran		11 tabung				11 tabung	
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Biro Tata Pemerintahan DIY	15 jenis	Rp 7.000.000,00	APBD		15 jenis	Rp 7.700.000,00
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan	Biro Tata Pemerintahan DIY	50.000 lembar	Rp 26.810.000,00	APBD		50.000 lembar	Rp 33.000.000,00
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	Biro Tata Pemerintahan DIY	12 bulan	Rp 248.145.000,00	APBD		12 bulan	Rp 660.000.000,00

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Laporan tindak lanjut hasil rapat koordinasi		12 bulan				12 bulan	
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Biro Tata Pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan DIY	1 tahun	Rp. 18.800.000,00	APBD		1 tahun	Rp. 20.000.000,00
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Biro Tata Pemerintahan DIY	1 jenis	Rp. 5.568.000	APBD		4 jenis	Rp. 83.000.000,00
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	Biro Tata Pemerintahan DIY	12 unit	Rp. 123.797.000,00	APBD		5 unit	Rp. 176.140.800,00

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMMD	Biro Tata Pemerintahan DIY	12 unit				12 unit	
	27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor	Biro Tata Pemerintahan DIY	12 bulan	Rp. 36.935.000,00	APDB		12 bulan	Rp. 50.000.000,00
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						-		
	15 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						-		
	28 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 usulan SK	Rp 81.054.000,00	APDB	-	3 usulan SK	Rp. 140.000.000,00
		Pengusulan dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah (Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta)		1 dokumen			-	1 dokumen	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
29	Fasilitasi Penataan Wilayah	Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	Rp 207.195.000,00		-	1 dokumen	Rp. 290.000.000,00
		Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY		1 dokumen			-	1 dokumen	
		Laporan Penyelarasan Pembangunan di wilayah perbatasan		1 dokumen			-	1 dokumen	
		Pilar perapatan batas daerah antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo yang terpasang		27 pilar			-	27 pilar	
16	Pelaksanaan Otonomi Daerah						-		

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	30 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Yogyakarta	1 dokumen	Rp. 203.482.000,00	APBD	-	1 dokumen	Rp. 350.000.000,00
		Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		1 dokumen			-	1 dokumen	
		Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM		1 dokumen			-	1 dokumen	
	31 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif	DIY	1 laporan	Rp 194.810.000,00	APBD	-	1 laporan	Rp. 410.000.000,00
		Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY		1 laporan			-	1 laporan	
		Laporan Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa		1 laporan			-	1 laporan	

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		(PTPD)							
17	Fasilitasi Kerjasama Daerah						-		
32	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintahan	Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur anggota FKD-MPU	DIY	2 SKB	Rp. 195.139.000,00	APBD		2 SKB	Rp. 210.000.000,00
		Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	DIY	5 naskah perjanjian				5 naskah perjanjian	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								
18	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Kaistimewa								

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
33	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Kota Yogyakarta	1 laporan	Rp. 1.450.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY	1 laporan	Rp. 600.000.000,00	
		Sistem Informasi Kalurahan		1 aplikasi			1 aplikasi		
		Sosialisasi kelembagaan asli daerah		1800 orang			1800 orang		
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY								
19	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY								

**RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
34	Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Laporan pemberhentian, penetapan dan pengesahan serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Kota Yogyakarta	1 dokumen	Rp. 561.250.000,00			1 dokumen	Rp. 611.000.000,00

Sumber : jogjaplan.com; RKPD DIY 2022, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022 merencanakan anggaran sebesar Rp 11.249.356.041,00 untuk melaksanakan 9 Program, 19 kegiatan, dan 34 subkegiatan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan dokumen tahunan yang berpedoman pada dokumen renstra perangkat daerah, dan mengacu pada RKPD daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 nanti, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY akan melaksanakan 9 Program, 19 kegiatan, dan 34 subkegiatan (Tabel 3.2 di atas). Sebagian besar subkegiatan rencananya akan dibiayai dengan skema anggaran APBD, selebihnya dengan Dana Keistimewaan. Lebih jelasnya berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 yang akan dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Tata Pemerintahan pada khususnya dan Pemerintah Daerah DIY pada umumnya.

Tabel 4. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	15 perangkat daerah

Disamping skema penganggaran APBD, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY semenjak Tahun 2017 menerima kegiatan dengan skema pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Secara mendetail belum bisa disampaikan, karena kegiatan beserta angka nominal anggarannya merupakan pemberian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memiliki petunjuk teknis pelaksanaan secara tersendiri, meskipun dalam pengelolaannya nanti diperlakukan sama dengan kegiatan dengan skema APBD.

PENUTUP

Rancangan Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada rancangan awal RKPD. Rancangan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN yang saat ini masih dalam proses penyusunan naskah Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Sehingga Rancangan Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD 2022.

Rancangan Renja 2022 ini merupakan gambaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Rancangan Renja 2022 diharapkan dapat memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; menyediakan acuan resmi bagi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD; memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam memahami dan menilai prioritas, sasaran, dan program-program operasional tahunan; serta sebagai tolokukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Rancangan Renja Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, serta sejumlah peraturan perundangan nasional, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan beberapa peraturan-perundangan tersebut di atas, terdapat sejumlah momen penting yang perlu diperhatikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2021 dan 2022, yang bisa mempengaruhi langkah Biro Tata Pemerintahan kedepannya. Sejumlah momen penting dimaksud adalah :

1. Penyusunan Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027;
2. Pelaksanaan beberapa kebijakan bidang Kependudukan, misalnya kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) dan percepatan pelayanan di bidang administrasi kependudukan.
3. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mengusulkan 6 Program, 16 kegiatan, dan 31 subkegiatan yang kegiatan yang dibiayai APBD dengan Penganggaran sebesar Rp 8.928.106.041,00. Sedangkan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan adalah 3 program, 3 kegiatan, dan 3 subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.321.250.000,00 .

Pada akhirnya, dalam mencapai target program dan kegiatan di Tahun 2022 nantinya, Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY.